

**PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BREBES**

Evi Indriani, Hardi Warsono

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Brebes Brebes Regency is one of the most populous areas in Central Java. With a population of 2,065,500 and a growth rate of 1.10%, this results in an annual waste generation of 372,861.55 tonnes. This situation requires an adaptive and integrated management system, given that the Kaliwlingi Landfill has become overloaded due to its open dumping system. Currently, waste management service coverage has only reached 21.38% of the target, with a daily collection volume of 225.25 tonnes. This low collection rate indicates that the majority of waste is not being managed optimally, presenting a crucial challenge in efforts to enhance the institutional capacity of waste management services in Brebes Regency. This study aims to analyse institutional capacity in waste management in Brebes Regency and to identify the factors supporting and hindering this institutional capacity. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques involving interviews and documentation. The research findings indicate that the institutional capacity for waste management in Brebes Regency remains suboptimal, as evidenced by limitations in human resources, facilities and infrastructure, as well as low levels of community participation in waste reduction and management activities. Factors supporting institutional capacity include the existence of governing regulations, conducive leadership, and a well-established work culture. Meanwhile, the inhibiting factors are that not all institutional actors are actively involved in supporting the success of waste management, which has resulted in suboptimal performance of waste management services in Brebes Regency.

Keywords: Institutional Capacity; Environmental Agency; Waste Management

ABSTRAK

Kabupaten Brebes sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Jawa Tengah. Besarnya populasi 2.065.500 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,10% berimplikasi pada timbulan sampah tahunan sebesar 372.861,55 ton. Kondisi ini memerlukan sistem pengelolaan yang adaptif dan terintegrasi mengingat TPA Kaliwlingi telah mengalami *overload* dengan sistem *open dumping*. Saat ini, realisasi pelayanan persampahan baru mencapai 21,38% dari target dengan volume pengangkutan harian sebesar 225,25 ton. Rendahnya rasio pengangkutan ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah belum tertangani secara optimal sehingga menjadi tantangan krusial dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pelayanan persampahan di Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kapasitas kelembagaan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes masih belum optimal yang tercermin dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Faktor pendukung kapasitas kelembagaan antara lain keberadaan regulasi yang mengatur, kepemimpinan yang kondusif, serta iklim budaya kerja yang terbangun dengan baik. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah belum seluruh aktor kelembagaan terlibat secara aktif dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah sehingga berdampak pada belum maksimalnya kinerja layanan persampahan di Kabupaten Brebes.

Kata Kunci: Kapasitas Kelembagaan; Dinas Lingkungan Hidup; Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Kabupaten Brebes sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Jawa Tengah. Besarnya populasi 2.065.500 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,10% berimplikasi pada timbulan sampah tahunan sebesar 372.861,55 ton. Kondisi ini memerlukan sistem pengelolaan yang adaptif dan terintegrasi mengingat TPA Kaliwlingi telah mengalami *overload* dengan sistem *open dumping*. Saat ini, realisasi pelayanan persampahan baru mencapai 21,38% dari target dengan volume pengangkutan harian sebesar 225,25 ton.

Rendahnya rasio pengangkutan ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah belum tertangani secara optimal sehingga menjadi tantangan krusial dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pelayanan persampahan di Kabupaten Brebes. Adapun data timbulan sampah berdasarkan kota/kabupaten di Jawa Tengah tahun 2024, sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Timbulan Sampah Terbesar Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2024



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kabupaten Brebes pada tahun 2024 mencapai sekitar 372.861.55 ton per tahun sehingga menempatkan daerah ini sebagai salah satu kabupaten dengan timbulan sampah terbesar di Jawa Tengah. Besarnya timbulan sampah tersebut berkaitan erat dengan jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang mencapai sekitar 2.065.500 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,10% per tahun.

Terjadi ketimpangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan kemampuan angkut. Timbulan sampah di Kabupaten Brebes mencapai lebih dari 372 ribu ton per tahun, tetapi kapasitas pelayanan saat ini baru menyentuh

angka 21,38%. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah liar di berbagai titik yang tidak terjangkau layanan.

TPA Kaliwlingi sebagai pusat pembuangan akhir sudah mengalami *overload* (melebihi kapasitas) dan masih menggunakan sistem *open dumping* yang berisiko mencemari lingkungan. Di sisi lain, keberadaan TPS 3R di tingkat desa banyak yang tidak beroperasi secara optimal karena kendala biaya operasional dan manajemen.

Gambar 1. 2 Kondisi TPA Kaliwlingi



Sumber: tvOnenews.com (2025)

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa TPA Kaliwlingi yang terlalu penuh dengan tumpukan sampah yang menutupi pintu masuk dan keluar serta pencemaran tanah di sekitar TPA yang berdampak pada penduduk di daerah sekitar TPA.

Apabila permasalahan ini tidak segera ditangani melalui penguatan kapasitas kelembagaan yang komprehensif, Kabupaten Brebes berada dalam bayang-bayang krisis

sampah sistemik. Risiko ini tidak hanya terbatas pada penumpukan fisik di TPA Kaliwlingi. Namun, akan berkembang menjadi krisis kesehatan publik akibat merebaknya penyakit bawaan lingkungan serta krisis ekonomi bagi sektor agraris dan perikanan yang menjadi tulang punggung daerah. Tanpa intervensi kebijakan yang adaptif dan peningkatan kapasitas manajerial pada Dinas Lingkungan Hidup, kegagalan pengelolaan sampah ini akan mencapai titik kritis di mana degradasi lingkungan menjadi tidak terkendali yang pada akhirnya akan menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Brebes.

Kajian mengenai persampahan di Kabupaten Brebes hingga saat ini masih terbatas pada aspek teknis operasional. Studi mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes umumnya didominasi oleh pendekatan teknis-material yang berfokus pada solusi hilir, seperti optimalisasi jumlah armada pengangkut, perluasan lahan TPA atau efektivitas teknologi pengolahan sampah di TPS 3R. Meskipun penting, penelitian dengan orientasi teknis tersebut cenderung mengabaikan akar persoalan mengapa intervensi fisik yang telah

dilakukan sering kali tidak berkelanjutan. Sebaliknya, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggeser fokus analisis dari aspek 'apa yang kurang' (sarana fisik) menjadi 'mengapa sistem tidak berjalan' (kapasitas kelembagaan).

Penelitian ini tidak hanya melihat keterbatasan fasilitas sebagai masalah mekanis, melainkan sebagai dampak dari lemahnya modalitas organisasi, struktur regulasi, dan jejaring koordinasi. Tanpa adanya pengembangan kapasitas kelembagaan yang komprehensif, target pengurangan sampah di Kabupaten Brebes tidak akan pernah tercapai. Penelitian ini krusial untuk memetakan kelemahan organisasi dan memberikan rekomendasi strategis dalam memperbaiki tata kelola sampah dari hulu ke hilir.

Maka dari itu, peneliti mengamati perlu dilakukannya penelitian guna menganalisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Brebes serta mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambatnya.

KAJIAN TEORI

a. Kapasitas Kelembagaan

Kapasitas kelembagaan

merupakan kemampuan seluruh komponen dan hubungan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara efektif dan efisien di Kabupaten Brebes. Menurut Hall (2003) terdapat beberapa dimensi kapasitas kelembagaan, sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia.
Kemampuan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugasnya secara efektif.
2. Kapasitas Keuangan
Kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes dalam mendapatkan, mengalokasikan, dan mengelola anggaran untuk pengelolaan sampah.
3. Kapasitas Jaringan dan Relasi.
Kemampuan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes dalam membangun dan memanfaatkan hubungan dengan berbagai pihak terkait dalam pengelolaan sampah.
4. Kapasitas Proses dan Infrastruktur.
Ketersediaan sarana, prasarana, serta sistem operasional yang mendukung pengelolaan sampah secara efektif.
5. Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan.

Kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes dalam menyusun strategi dan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang terkait pengelolaan sampah.

b. Faktor Pendorong dan Penghambat Kapasitas Kelembagaan

Menurut Riyadi (dalam Hani & Safitri, 2019), terdapat empat komponen yang mempengaruhi kapasitas kelembagaan, sebagai berikut:

1. Reformasi Peraturan, yakni dasar regulasi yang mengatur atau yang menjadi landasan bagi operasi pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes.
2. Kepemimpinan, yakni mencakup peran dan tanggung jawab pemimpin dalam meningkatkan pengelolaan sampah.
3. Reformasi Kelembagaan, yakni iklim dan budaya yang mendukung kemampuan kelembagaan untuk mengelola sampah dengan baik.
4. Komitmen Bersama, yakni mencakup semua orang yang berkontribusi untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Brebes. Situs penelitian dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri dari Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran, Jabatan Fungsional, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Brebes, dan Kepala Subbagian Tata Usaha.

Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, situs internet dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Brebes

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam pengelolaan sampah

karena keberhasilan layanan sangat bergantung pada jumlah dan kompetensi aparatur. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah pegawai yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes sebanyak 337 orang yang terdiri dari 103 ASN, 231 Non-ASN, dan 3 tenaga outsourcing. Jumlah tersebut dinilai belum ideal mengingat luas wilayah Kabupaten Brebes dan banyaknya titik layanan persampahan yang harus ditangani.

Keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan beban kerja yang tinggi, terutama bagi petugas lapangan. Selain itu, pengembangan kompetensi pegawai belum dilakukan secara terstruktur sehingga peningkatan kapasitas masih bersifat informal melalui sistem pembelajaran senior dan junior. Kondisi ini berdampak pada dominannya pendekatan pengangkutan dibandingkan pengurangan sampah dari sumber.

b. Kapasitas Keuangan

Kapasitas keuangan

berperan penting dalam mendukung operasional pengelolaan sampah, termasuk penyediaan sarana prasarana dan peningkatan layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan operasional secara optimal. Hal ini berdampak pada keterbatasan pengadaan kendaraan pengangkut, fasilitas pengolahan sampah, serta dukungan terhadap program pengurangan sampah berbasis masyarakat.

Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan organisasi dalam melakukan inovasi layanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif, seperti kerja sama dengan sektor swasta dan program CSR.

c. Kapasitas Jaringan dan Relasi

Kapasitas jaringan dan relasi menunjukkan kemampuan organisasi dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Brebes telah menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan seperti Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS), organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pekerjaan Umum, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut mencerminkan adanya upaya penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pengelolaan sampah. Namun demikian, hubungan kerja sama yang terbangun masih bersifat koordinatif dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam mekanisme kerja yang berkelanjutan sehingga kontribusinya terhadap integrasi pengelolaan sampah secara menyeluruh belum optimal.

Meskipun komunikasi telah terjalin, dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam pemilahan sampah belum optimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya layanan persampahan di seluruh wilayah serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan

sampah dari sumber. Oleh karena itu, penguatan jaringan diperlukan melalui integrasi sistem informasi serta pelembagaan mekanisme koordinasi lintas aktor.

d. Kapasitas Proses dan Infrastruktur

Kapasitas proses dan infrastruktur berkaitan dengan ketersediaan sarana dan sistem operasional dalam pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana prasarana yang tersedia masih belum memadai. Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kaliwlingi yang mengalami *overload* serta keterbatasan jumlah TPS 3R menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, sistem pengelolaan sampah masih didominasi oleh pola kumpul-angkut-buang sehingga pengurangan sampah dari sumber belum berjalan optimal. Minimnya penggunaan teknologi juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi layanan.

e. Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan

Kapasitas perencanaan

dan pengembangan di DLH Kabupaten Brebes saat ini masih terjebak pada pemenuhan aspek administratif jangka pendek yang belum sepenuhnya berbasis pada proyeksi timbulan sampah jangka panjang maupun pendekatan inovatif. Kondisi ini menjadi hambatan strategis karena fungsi pengembangan kelembagaan dan adopsi teknologi modern belum menjadi arus utama dalam dokumen perencanaan sehingga program yang dijalankan cenderung bersifat reaktif terhadap tumpukan sampah daripada preventif di tingkat sumber. Faktor pendukung kapasitas ini adalah telah tersedianya dokumen perencanaan formal, seperti Jakstrada dan RPJMD, tetapi implementasinya dihambat oleh kurangnya sinkronisasi antara perencanaan teknis dengan ketersediaan anggaran serta rendahnya fleksibilitas kebijakan dalam menghadapi dinamika volume sampah.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pengembangan

Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Brebes

A. Faktor Pendorong

a. Reformasi Peraturan

Pada aspek reformasi peraturan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi daerah terkait pengelolaan sampah telah tersedia dan menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes. Adanya peraturan pengelolaan sampah yang mencakup peraturan umum dan teknis, baik terkait kebijakan maupun mekanisme kelembagaan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang optimal. Adanya Regulasi terkait pengelolaan sampah tercantum pada Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Perbup Nomor Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 43 Tahun 2023 tentang Desa Mandiri Sampah melalui Gerakan Brebes Bebas Sampah Plastik Pilah Pilih Olah Sampah dari Rumah, Peraturan Bupati

Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Brebes dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengurangan Sampah Plastik Berbasis Masyarakat. Keberadaan regulasi menjadi modal penting dalam penguatan kapasitas kelembagaan karena memberikan arah kebijakan, legitimasi tindakan, dan dasar koordinasi lintas sektor.

Keberadaan regulasi menjadi modal penting dalam penguatan kapasitas kelembagaan karena memberikan arah kebijakan, legitimasi tindakan, dan dasar koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, reformasi peraturan berperan sebagai faktor pendorong, meskipun efektivitas implementasi dan penegakannya masih perlu ditingkatkan.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan menunjukkan adanya komitmen dalam menjalankan program

pengelolaan sampah. Dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan program dan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi energi penggerak bagi organisasi. Hal ini menempatkan kepemimpinan sebagai faktor pendorong penting meskipun penguatan pada aspek kepemimpinan transformasional dan inovatif masih diperlukan untuk mempercepat peningkatan kinerja.

c. Reformasi Kelembagaan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes memiliki iklim kerja yang cukup kondusif dan mekanisme koordinasi yang berjalan. Namun, upaya pembenahan kelembagaan dan penguatan tata kerja masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya mendorong peningkatan kapasitas organisasi secara signifikan.

B. Faktor Penghambat

a. Komitmen Bersama

Dukungan OPD terkait, masyarakat, dan sebagian mitra eksternal terhadap program persampahan telah terlihat. Namun, tingkat keterlibatan

masih bervariasi. Pelaksanaan program lintas aktor sudah berjalan, tetapi konsistensi dan kedalaman kolaborasi belum sepenuhnya optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah serta masyarakat masih menganggap sampah sepenuhnya menjadi urusan pemerintah daerah tanpa perlu partisipasi warga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes secara umum belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Rendahnya cakupan pelayanan sampah di Kabupaten Brebes yang baru mencapai 21,38% serta kondisi TPA Kaliwlingi yang *overload* bukan hanya masalah teknis, melainkan konsekuensi langsung dari kapasitas kelembagaan yang belum optimal. Melalui teori Hall (2003) ditemukan bahwa akar masalah utama terletak pada lemahnya kapasitas perencanaan dalam memitigasi lonjakan timbulan sampah sebesar 372.861,55 ton per tahun. Faktor yang paling dominan menghambat kinerja pengelolaan sampah adalah rendahnya

kapasitas jaringan dan relasi. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada peran pemerintah daerah tanpa adanya kolaborasi yang kuat dengan sektor swasta maupun masyarakat menyebabkan beban operasional menumpuk hanya pada satu instansi.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator reformasi peraturan menjadi pendorong Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi daerah terkait pengelolaan sampah telah tersedia dan menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes. Adanya peraturan pengelolaan sampah yang mencakup peraturan umum dan teknis, baik terkait kebijakan maupun mekanisme kelembagaan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang optimal. Kesesuaian antara tujuan yang direncanakan dengan hasil implementasi.

Keberadaan regulasi menjadi modal penting dalam penguatan kapasitas kelembagaan karena memberikan arah kebijakan, legitimasi tindakan, dan dasar koordinasi lintas sektor.

Kepemimpinan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes menunjukkan adanya komitmen dalam menjalankan program pengelolaan sampah. Dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan program dan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi energi penggerak bagi organisasi. Hal ini menempatkan kepemimpinan sebagai faktor pendorong penting meskipun penguatan pada aspek kepemimpinan transformasional dan inovatif masih diperlukan untuk mempercepat peningkatan kinerja.

Aspek kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes telah memiliki perangkat organisasi yang menangani persampahan yang menunjukkan adanya fondasi kelembagaan yang memadai. Kejelasan mandat organisasi dan keberadaan UPT menjadi modal awal dalam pengembangan kapasitas. Selain itu, terciptanya iklim dan budaya kerja yang kondusif, baik antarpegawai maupun antara pegawai dengan pimpinan, sehingga mendukung koordinasi dan mempermudah pencapaian tujuan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dapat dikategorikan sebagai faktor pendorong walaupun masih diperlukan penataan

lebih lanjut agar organisasi menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi kinerja.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator komitmen bersama menjadi faktor penghambat pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes. Hal itu disebabkan karena partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah masih rendah, keterlibatan sektor swasta belum optimal, dan sinergi pemerintah desa belum konsisten. Kondisi ini menjadikan komitmen bersama sebagai faktor penghambat utama yang menahan efektivitas faktor pendorong yang telah ada. Tanpa penguatan komitmen multipihak, pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes berpotensi berjalan lambat.

SARAN

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes perlu untuk menyusun program pelatihan teknis berkelanjutan bagi petugas lapangan dan pengelola TPS 3R. Tahapan implementasi dimulai dengan identifikasi kebutuhan diklat pada triwulan pertama, diikuti penyusunan

modul pelatihan yang mencakup teknik pemilahan berbasis 3R dan keselamatan kerja (K3), serta pelaksanaan pelatihan rutin setiap semester. Indikator keberhasilan dari langkah ini, yakni terbitnya sertifikat kompetensi bagi minimal 80% petugas lapangan dan tercapainya kondisi *zero accident* pada operasional persampahan harian.

- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes perlu menggeser pola kemitraan dari sekadar administratif menjadi kolaboratif-strategis dengan mendorong pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk teknologi pengolahan sampah. Tahapan implementasi dilakukan melalui pemetaan potensi perusahaan pada tahun pertama, yang diikuti dengan pembuatan proposal proyek strategis, seperti pengadaan unit *Refuse-Derived Fuel (RDF)* dan penandatanganan *MoU* jangka panjang. Indikator keberhasilan strategi ini diukur dari terealisasinya minimal satu *pilot project* teknologi pengolahan

sampah yang didanai sepenuhnya melalui skema kerja sama sektor swasta.

- c. Perlunya membentuk Forum Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes yang bersifat permanen dan diformalkan melalui keputusan kepala daerah. Forum ini sebaiknya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan OPD terkait, pemerintah desa atau kelurahan, sektor swasta melalui program *CSR*, kalangan akademisi, serta komunitas masyarakat. Secara operasional, forum perlu memiliki mekanisme rapat koordinasi minimal setiap triwulan, rencana aksi lintas sektor tahunan, skema berbagi data persampahan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi bersama.
- d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes perlu mengembangkan sistem monitoring persampahan berbasis digital, seperti aplikasi pelaporan titik sampah oleh masyarakat, dashboard pemantauan armada pengangkut, sistem pencatatan operasional TPS 3R dan bank sampah, serta

- digitalisasi data timbulan dan cakupan layanan.
- e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes perlu melaksanakan langkah operasional berupa audit berkala terhadap seluruh TPS 3R, pendampingan manajemen bagi pengelola desa, pemberian skema insentif kinerja bagi TPS 3R yang aktif, serta integrasi operasional TPS 3R dengan sistem pengangkutan. Intervensi ini penting karena sebagian TPS 3R masih menghadapi kendala pendanaan desa dan aspek administratif yang menghambat keberfungsian fasilitas secara maksimal.
- f. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah dan menjadi salah satu hambatan utama, maka diperlukan program Gerakan Pilah Sampah dari Rumah berbasis RT/RW yang dilaksanakan secara bertahap. Upaya ini perlu didukung dengan penguatan dan reaktivasi bank sampah berbasis komunitas, kampanye edukasi rutin melalui sekolah, PKK, dan

karang taruna, serta pemberian insentif non-tunai bagi masyarakat yang aktif melakukan pemilahan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, A. F., Sukarno, D. (2025). Kapasitas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dalam Menerbitkan Dokumen Kependudukan. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16 (2) Hal. 182 – 191.
- Anggraini, D. (2021). Pengembangan Kapasitas Pegawai dalam Mewujudkan Good Governance pada Kantor Kepegawaian Daerah Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v4i1.683>
- Anwar, C., Hanim, Z. (2025). Pengembangan Kapasitas Lembaga (Strategi dan Kebijakan untuk Peningkatan Kualitas Sistem Layanan dan Kelembagaan). *Journal on Education*, 07 (02).
- Apricia, N., Jeremiah, M., & Trinovada, A. (2023). Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 553-559.
- Arifin, S., & Syamsuddin. (2021). Strengthening institutional capacity of the sanitation department in Balikpapan City. *Journal of Public Administration Studies*, 6(2), 45-58.
- Djaya, S., & Mahsyar, A. (2021). Model McKinsey dalam Pengembangan

- Kapasitas Kelembagaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 155–161.
<https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1814>.
- Fadli, M., Amirullah, & Mahmud. (2022). *Institutional capacity of waste management in the Environmental Service of Palangka Raya City. International Journal of Social Science and Human Research*, 5(08), 3412-3420.
<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i8-25>
- Grindle, M. S. (Ed.). (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries. Harvard Institute for International Development. Cambridge: Harvard University Press.*
- Hall, M. H. (2003). *The Capacity to Serve a Qualitative Study of the Challenges Facing Canada's Nonprofit and Voluntary Organizations. Canada: Canadian Centre for Philanthropy.*
- Hidayat, R., & Nurhayati. (2021). *Capacity building dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 112-125.
- Horton, D., Alexaki, A., Bennett-lartey, S., Brice, K. N., Campilan, D., Carden, F., Silva, J. D. S., & Duong, L. T. (2003). *Evaluating Capacity Development Experiences from research and Developing Organizations Around the World (The Hague (ed.)). International Service for National Agricultural Research.*
- Iqbal, M., Mirna, R., & Susanti, E. (2023). Kapasitas Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortukultura Provinsi Jabar dalam Pengembangan Benih Padi Induk. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, Volume 14 (2) Hal. 685 – 689.
- Latif, A.S., Herman & Dewi, Y.Y. (2023). Analisis Faktor Penghambat Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dinas P3APM Kota Pekanbaru pada Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 10(2), 171-180.
- Miftahul Jannah, & Zulkarnaini, Z. (2021). Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Arboretum Gambut Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 191–201.
[https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).7469](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7469).
- Mulyadin, R. M., Ariawan, I., Bangsawan, I., Subarudi., & Iqbal, M. (2023). Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah untuk Peningkatan Kebersihan di Kota Bandung (*Institution in Waste Management for Improvement Cleanliness in Bandung City*). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 20(1), 21-33.
<http://dx.doi.org/10.59100/jakk.2023.20.1.21-33>.
- Mulyadi, & Rahman. (2022). *Public sector capacity building in waste service management in Pontianak City. Journal of Governance and Public Policy*, 9(3), 210-225.
- Novita, E., Utami, S. B., & Karlina, N. (2021). Kapasitas Organisasi

- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dalam Mengembangkan Sentra Industri Kreatif Payung Geulis di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Administrasi Negara*. Volume 13, Number 1.
- Nur, S. M., Rahmawati, Ramadhan, S. (2024). Pengembangan Kapasitas Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Kota Baubau. *Administratio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Volume 13 (2), 56-64. DOI: <https://doi.org/10.55340/administratio.v13i2.1703>.
- Pamungkas, L. D., Kismartini, K., & Astuti, R. S. (2020, December). *The Analysis of Organizational Capacity Factors in Government Division of Regional Secretariat as A Determinant of Government Performance at Batang Regency. In Iapa Proceedings Conference*, 80-100.
- Pitaloka, M. L. A., et al. (2024). Modal Sosial dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kota Makassar. *PINISI: Journal of Art, Humanity, & Social Studies*.
- Saptari, D., Susanti, E., & Suprayogi, Y. (2021). Kapasitas Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Mengembangkan Pariwisata Unggulan Kabupaten Tasikmalaya. (*JANE*) *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 13 (1).
- Sari, D. P., & Wicaksono, A. (2021). *Capacity building* aparatur dalam meningkatkan kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Mediasosian*, 5(2), 156-170.
- Sururi, A., Zainuri, A., Sarwah, P. H., & Romdoniyah, S. (2023). Kapasitas Kelembagaan dalam Penanganan Bencana di Provinsi Banten. *Jurnal Administrative Reform*, 11(1), 1-16.
- Syahri, & Supardi. (2021). Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Kemoring Ulu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 32-40.